

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pemaparan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang sudah sesuai dengan pedoman yang digunakan yakni UU SPPA, Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 , serta PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di Polresta Padang ini, sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
2. Pelaksanaan diversifikasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang sudah berjalan dengan baik, dimana terdapat 14 (empat belas) kasus yang berhasil diselesaikan melalui jalur diversifikasi dari total sepanjang 2015-2017.
3. Ada hambatan-hambatan yang didapatkan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Padang, seperti korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Ada pula pihak korban atau keluarganya beranggapan hukum berat sebelah dan memihak kepada

tersangka. Alasan- Alasan seperti ini yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi gagal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. SDM di Unit PPA Polresta Padang harus diberikan sosialisasi yang bekerjasama dengan kementerian sosial, agar pelaksanaan dapat dipertahankan dengan baik, untuk menjaga hubungan yang baik antar instansi pemerintahan.
2. Sudah sebaiknya peraturan internal Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi direvisi disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana peraturan internal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebaiknya pihak Polresta Padang meyakinkan pihak keluarga korban agar pelaksanaan diversi dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja aparat dalam melaksanakan diversi di Polresta Padang.